



## Ada Sumber Pendanaan Alternatif

Pembangunan Ruas Jalan Sleman-Gunungkidul Tetap Berlanjut Meski Ada Efisiensi Anggaran

**YOGYA, TRIBUN** - Proyek pembangunan jalan ruas Sleman-Gunungkidul dipastikan bakal tetap berjalan, di tengah gencarnya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahkan memastikan proyek vital ini masih beres di jalur yang tepat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, menegaskan bahwa meski sejumlah proyek infrastruktur harus dihentikan atau dilaji ulang akibat adanya efisiensi, pembangunan jalan Sleman-Gunungkidul tetap berjalan. "Beberapa proyek memang harus dibatalkan, tetapi proyek ini tetap lanjut karena didukung sumber pendanaan alternatif," ujarnya, Senin (10/2).

Hingga kini, sisa jalan sepanjang 9,08 kilometer di ruas Prambanan-Gayambarjo menjadi fokus utama untuk diselesaikan. Targetnya, jalan ini bisa tersambung sepenuhnya pada 2027. Meski terdampak, pendanaan proyek ini tetap bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan (Daus), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saat ini masih dibahas apakah alokasi anggarannya tetap atau akan dikurangi. Namun, kami berkomitmen melanjutkan proyek ini," tambah Anna. Rincian progres pembangunan menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 2023, sepanjang 1,275 kilometer berhasil dihangatkan menggunakan anggaran Indeks Desa Membangun (IDM). Tahun 2024, proyek ini berlanjut dengan tambahan 0,4 kilometer yang dibiayai dari Dana.

### TAK TERDAMPAK

- Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di DIY terpaksa dihentikan setelah munculnya program efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
- Namun begitu, Pemda DIY memastikan proyek pembangunan jalan ruas Sleman-Gunungkidul bakal tetap berjalan.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, menyebut proyek ini tetap lanjut karena didukung sumber pendanaan alternatif.

Untuk 2025, ditargetkan pembangunan 0,95 kilometer melalui Dana dan 1,93 kilometer menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski bergantung terhadap ketersediaan anggaran, Pemda DIY tetap optimistis proyek ini dapat selesai sesuai target.

"Kami terus mengusulkan pendanaan tambahan melalui APBN agar proyek ini rampung pada 2027," jelas Anna.

Namun, tidak semua proyek memiliki nasib serupa. Dua proyek besar, yaitu pembangunan Jalan Sentolo-Brosot senilai Rp17,5 miliar dan proyek trigasi Glendongan dengan nilai Rp2 miliar, terpaksa dihentikan akibat efisiensi anggaran. "Kedua proyek ini tidak bisa dilanjutkan karena keterbatasan dana," ungkap Anna.

Meskipun menghadapi tantangan finansial, Pemda DIY menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek prioritas demi mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY. "Kami tetap berupaya agar proyek-proyek prioritas bisa terlaksana dengan optimal meskipun ada keterbatasan anggaran," pungkasnya.

### WFH

Di sisi lain, terkait efisiensi anggaran, Pemda DIY tengah melakukan kajian mendalam terkait penerapan kebijakan *work from home* (WFH), seiring

dengan rencana pemerintah pusat yang masih menggodok aturan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengatakan, pihaknya sudah memiliki pengalaman WFH saat pandemi Covid-19. Pihaknya akan menaati peraturan dari pemerintah pusat untuk penghematan.

"Oleh karena itu, saat ini kami melakukan kajian tentang penghematan yang saya janjikan tanggal 10 kemarin. Hasil kajian tersebut akan menunjukkan seberapa besar penghematan yang bisa dirapai. Dua hari setelah itu, semua rincian penghematan yang dilakukan akan dirilis," tambahnya.

Beny menegaskan bahwa prinsip utama dalam penerapan WFH adalah tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik. Pemda DIY berencana mengatur jadwal kerja secara rotasi untuk memastikan efisiensi biaya operasional seperti penggunaan kendaraan dinas, listrik, dan langganan internet tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Misalnya, saat pandemi dulu, layanan Samsat tetap berjalan di hari Sabtu, tetapi petugasnya digilir. Jadwal kerja diperbarui dan diatur dengan presensi yang ketat sehingga mudah dimonitor siapa yang bertugas dan siapa yang libur," tambah Beny. (han)